

## Analisis Tantangan Guru PPKn Dalam Menghadapi Perubahan Kurikulum K13 Dengan Kurikulum Merdeka

Adelina M Aritonang<sup>1</sup> Devi Permata Br Bangun<sup>2</sup> Eka Putriani Sihombing<sup>3</sup> Iwain Oktaviona Nababan<sup>4</sup> Seevaira Chyta Simanullang<sup>5</sup> Sri Yunita<sup>6</sup> Chandra Fhutu Neva<sup>7</sup>

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>

Email: [adelina31aritonang@gmail.com](mailto:adelina31aritonang@gmail.com)<sup>1</sup> [devipermata863@gmail.com](mailto:devipermata863@gmail.com)<sup>2</sup> [ekaputriani@ung.edu](mailto:ekaputriani@ung.edu)<sup>3</sup> [iwainnababan@gmail.com](mailto:iwainnababan@gmail.com)<sup>4</sup> [seevairachyta@gmail.com](mailto:seevairachyta@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Perubahan kurikulum ini membawa implikasi terhadap peran guru, pendekatan pembelajaran, dan sistem asesmen yang menuntut kemampuan adaptasi, kreativitas, serta literasi kurikulum yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam menghadapi perubahan kurikulum dari Kurikulum 2013 (K13) menuju Kurikulum Merdeka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kepustakaan (library research), merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama guru PPKn meliputi keterbatasan pemahaman terhadap filosofi Kurikulum Merdeka, kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek, keterbatasan sarana prasarana, serta kesenjangan literasi digital. Selain itu, perubahan paradigma pembelajaran yang menuntut guru menjadi fasilitator juga menjadi hambatan tersendiri bagi sebagian guru yang terbiasa dengan sistem konvensional. Penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan kelembagaan, pelatihan berkelanjutan, serta kolaborasi antar guru untuk mengoptimalkan implementasi Kurikulum Merdeka. Dengan demikian, guru PPKn diharapkan mampu berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter pelajar Pancasila yang kritis, demokratis, dan bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Guru PPKn, Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, Tantangan Implementasi, Pendidikan Karakter

### Abstract

*This curriculum change carries implications for the roles of teachers, learning approaches, and assessment systems, all of which demand adaptability, creativity, and high curriculum literacy. This study aims to analyze the challenges faced by Civics Education (PPKn) teachers in dealing with the curriculum transition from the 2013 Curriculum (K13) to the Merdeka Curriculum. The method used in this study is the library research method, which involves examining and analyzing various written sources relevant to the research topic, such as books, scientific journals, research reports, and official documents. The findings indicate that the main challenges for PPKn teachers include limited understanding of the philosophy of the Merdeka Curriculum, difficulties in implementing project-based learning, inadequate infrastructure, and gaps in digital literacy. In addition, the shift in the learning paradigm that requires teachers to act as facilitators also poses challenges for those accustomed to conventional systems. This study emphasizes the importance of institutional support, continuous training, and collaboration among teachers to optimize the implementation of the Merdeka Curriculum. Therefore, PPKn teachers are expected to serve as agents of change who not only transfer knowledge but also shape Pancasila learners with critical thinking, democratic values, and a sense of responsibility.*

**Keywords:** PPKn Teachers, 2013 Curriculum, Merdeka Curriculum, Implementation Challenges, Character Education



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan kurikulum seiring dengan tuntutan perkembangan zaman dan arus globalisasi. Salah satu mata pelajaran yang memiliki peran strategis adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), karena melalui mata pelajaran ini peserta didik diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta mengembangkan sikap demokratis dan bertanggung jawab. Menurut Daryono (2020), PPKn bukan hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter dan identitas bangsa. Perubahan kurikulum dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka membawa dampak signifikan bagi guru, termasuk guru PPKn. Kurikulum Merdeka dirancang dengan menekankan pembelajaran berbasis kompetensi, diferensiasi, serta penguatan profil pelajar Pancasila. Hal ini tentu menuntut guru PPKn untuk menyesuaikan strategi pembelajaran agar tujuan pembentukan karakter bangsa tetap tercapai. Seperti diungkapkan oleh Hidayat, Firdaus, dan Sari (2022), konsep Kurikulum Merdeka menekankan kebebasan yang lebih luas kepada guru, namun kebebasan ini justru menjadi tantangan karena membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi.

Dalam praktiknya, guru menghadapi berbagai kendala. Mulai dari keterbatasan pemahaman terhadap konsep kurikulum baru, minimnya pelatihan, hingga keterbatasan sarana pembelajaran di sekolah. Hasanah dan Pratiwi (2023) menjelaskan bahwa masih banyak guru PPKn yang belum siap mengimplementasikan kurikulum baru karena kurangnya pendampingan dan pelatihan yang berkesinambungan. Kondisi ini berimplikasi pada efektivitas pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk profil pelajar Pancasila. Pelajaran PPKn, perubahan kurikulum menuntut guru lebih kreatif dalam menyusun perangkat ajar, menerapkan pendekatan kontekstual, dan mengaitkan isu-isu kewarganegaraan dengan realitas sehari-hari. Rahmawati (2021) menegaskan bahwa peran guru PPKn semakin kompleks karena tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan siswa. Aspek penilaian juga mengalami pergeseran yang signifikan. Jika pada Kurikulum 2013 penilaian lebih banyak berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar, maka pada Kurikulum Merdeka penilaian diarahkan pada capaian pembelajaran dan asesmen formatif. Lestari (2022) menjelaskan bahwa perubahan sistem penilaian ini membuat guru harus menyesuaikan instrumen evaluasi agar lebih fokus pada perkembangan kompetensi siswa secara holistik. Tantangan lain berkaitan dengan paradigma belajar yang menekankan kemandirian siswa. Dalam Kurikulum Merdeka, peserta didik diberi ruang untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya, sedangkan guru lebih berperan sebagai fasilitator. Putra dan Sari (2022) menyatakan bahwa perubahan paradigma ini menuntut guru memiliki kesiapan pedagogis dan metodologis agar dapat mendukung pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Perbedaan kondisi sekolah di Indonesia juga memperberat implementasi kurikulum. Wahyudi (2023) menemukan bahwa sekolah di daerah dengan keterbatasan sarana dan sumber daya menghadapi hambatan lebih besar dalam menerapkan Kurikulum Merdeka dibandingkan sekolah-sekolah di perkotaan. Hal ini menciptakan disparitas dalam penerapan kurikulum yang seharusnya dapat dijalankan secara merata.

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks itu, PPKn hadir sebagai mata pelajaran yang berfungsi membentuk warga negara yang berkarakter Pancasila. Sisdiknas (2003) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian penting dalam

pembentukan identitas nasional. Kurikulum 2013, yang sebelumnya diterapkan, memiliki orientasi pada penguatan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, K13 kerap menghadapi kritik karena terlalu kompleks dari sisi administrasi guru. Sulfemi (2019) mencatat bahwa banyak guru merasa terbebani dengan laporan penilaian yang rumit, sehingga mengurangi fokus mereka pada pembelajaran di kelas. Kehadiran Kurikulum Merdeka dimaksudkan untuk menyederhanakan beban tersebut dan memberikan keleluasaan kepada guru dan sekolah dalam menentukan strategi pembelajaran. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2021) dalam panduannya menekankan bahwa Kurikulum Merdeka berorientasi pada pembelajaran yang fleksibel, relevan, dan berbasis proyek untuk memperkuat profil pelajar Pancasila.

Konsekuensi dari perubahan ini adalah bergesernya peran guru, dari sekadar penyampai materi menjadi fasilitator, motivator, sekaligus inovator. Munirah (2022) menjelaskan bahwa guru dituntut tidak hanya menyampaikan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas sosial dan isu-isu aktual yang sedang dihadapi masyarakat. Namun, tantangan utama guru PPKn dalam menghadapi perubahan kurikulum terletak pada keterbatasan pemahaman tentang filosofi Kurikulum Merdeka serta kesulitan menyesuaikan perangkat ajar dengan capaian pembelajaran baru. Hidayat et al. (2022) menyebutkan bahwa tanpa adanya pelatihan yang intensif, guru akan kesulitan beradaptasi dengan kurikulum yang menuntut kreativitas lebih tinggi. Guru PPKn juga harus menghadirkan pembelajaran yang partisipatif dan relevan dengan kehidupan nyata. Hasanah dan Pratiwi (2023) menyoroti bahwa banyak siswa masih menganggap PPKn sebagai pelajaran teoritis dan membosankan, sehingga guru perlu mencari strategi kreatif agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Dukungan kebijakan pendidikan yang memadai juga sangat menentukan. Rahmawati (2021) menegaskan perlunya pelatihan berkelanjutan, penyediaan sumber belajar yang relevan, serta pembentukan komunitas guru sebagai sarana berbagi praktik baik dalam implementasi kurikulum. Tanpa hal itu, tantangan implementasi Kurikulum Merdeka akan sulit diatasi.

Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pembelajaran berbasis proyek sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Namun, dalam praktiknya, guru PPKn sering menghadapi kesulitan dalam merancang proyek yang sesuai dengan tema kewarganegaraan. Tantangan muncul karena tidak semua guru memiliki pengalaman dalam menyusun proyek yang kontekstual dengan kehidupan siswa, sehingga pembelajaran terkadang masih bersifat teoritis dan belum mampu menyentuh persoalan nyata di lingkungan mereka. Kendala dalam merancang pembelajaran, sebagian guru juga mengalami resistensi terhadap perubahan. Kebiasaan yang sudah terbentuk pada Kurikulum 2013 membuat sebagian guru merasa kurang nyaman dengan tuntutan baru dalam Kurikulum Merdeka. Hal ini menyebabkan adaptasi berjalan lambat, bahkan ada guru yang masih mengajar dengan pola lama meskipun kurikulum baru sudah mulai diterapkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendampingan yang lebih intensif agar guru merasa percaya diri dan siap menghadapi perubahan.

Aspek penguasaan teknologi juga menjadi faktor penting yang seringkali menjadi hambatan. Kurikulum Merdeka menuntut guru agar dapat memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian. Namun, tidak semua guru PPKn terbiasa menggunakan media digital atau platform pembelajaran daring. Akibatnya, ada kesenjangan antara tuntutan kurikulum dengan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Pendekatan pembelajaran diferensiasi juga menjadi tantangan tersendiri. Kurikulum Merdeka mendorong guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Namun, kenyataannya, jumlah siswa yang banyak dalam satu kelas membuat guru kesulitan

menerapkan strategi ini secara optimal. Akibatnya, pembelajaran sering kembali pada pola umum yang kurang memperhatikan keragaman individu siswa. Kurikulum Merdeka juga memperkenalkan konsep pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, bukan hanya berdasarkan jenjang kelas. Dalam mata pelajaran PPKn, konsep ini menuntut guru untuk menyusun materi secara bertahap agar mudah dipahami sesuai usia dan tingkat perkembangan siswa. Namun, keterbatasan pemahaman guru dalam merancang materi yang sesuai dengan prinsip ini sering membuat pembelajaran menjadi tidak konsisten dan kurang terarah. Faktor lingkungan sekolah dan dukungan dari berbagai pihak juga sangat menentukan keberhasilan implementasi kurikulum. Guru PPKn tidak bisa bekerja sendirian, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, bahkan pemerintah daerah. Dukungan dalam bentuk fasilitas, iklim sekolah yang kondusif, serta regulasi yang jelas akan membantu guru melaksanakan Kurikulum Merdeka dengan lebih baik. Tanpa adanya sinergi tersebut, guru akan menghadapi kesulitan yang semakin kompleks dalam melaksanakan pembelajaran PPKn sesuai arah kurikulum baru.

### Kajian Teori

1. Teori Perubahan Kurikulum. Perubahan kurikulum merupakan konsekuensi logis dari dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Menurut Ornstein dan Hunkins (2018), kurikulum harus bersifat dinamis dan terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik. Sementara itu, Fullan, M. (2007) menekankan bahwa perubahan kurikulum harus holistik dan berkelanjutan, bukan sekadar modifikasi dokumen. Menurutnya, reformasi yang sukses melibatkan kolaborasi guru, orang tua, dan pemangku kepentingan, serta fokus pada "change capacity" (kapasitas perubahan). Ia mengkritik perubahan kurikulum yang terlalu cepat tanpa dukungan pelatihan, yang sering gagal karena resistensi dari guru. Dalam konteks Indonesia, Fullan relevan dengan transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka, di mana ia menyarankan pendekatan bertahap untuk menghindari kebingungan implementasi.
2. Teori Peran Guru. Menurut Teori Ki Hajar Dewantara tentang peran guru dikembangkan melalui filosofi "Tri Nga" (tiga prinsip pendidikan), yang mencakup: Ing Ngarso Sung Tulodo (di depan memberi teladan), Ing Madyo Mangun Karso (di tengah membangun semangat), dan Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan). Konsep ini menggambarkan guru sebagai figur dinamis yang beradaptasi dengan tahap perkembangan siswa, bukan otoritas yang mendominasi. Secara spesifik, peran guru sebagai pembimbing alamiah menekankan pendekatan individualisasi, di mana guru mengenali bakat dan potensi unik setiap siswa untuk memfasilitasi belajar yang sesuai dengan ritme alamiahnya. Dewantara (1952) menyatakan bahwa pendidikan harus "menumbuhkan jiwa bangsa" melalui integrasi nilai budaya lokal, seperti gotong royong dan harmoni dengan alam, sehingga guru berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan universal dan konteks Indonesia.
3. Teori Implementasi Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan inovasi kebijakan pendidikan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek, 2021) untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada siswa, serta berorientasi pada penguatan Profil Pelajar Pancasila. Menurut Hidayat, Firdaus, dan Sari (2022), implementasi Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada guru dalam mengembangkan materi ajar, memilih metode, dan merancang asesmen sesuai dengan kebutuhan serta potensi peserta didik. Namun, fleksibilitas tersebut juga menuntut guru memiliki kemampuan reflektif dan inovatif agar pembelajaran tetap terarah dan bermakna.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kepustakaan (library research), merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi. Dalam konteks penelitian tentang tantangan guru PPKn dalam menghadapi perubahan kurikulum K13 ke Kurikulum Merdeka, metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis data dari literatur yang membahas implementasi, hambatan, serta strategi adaptasi guru terhadap perubahan kurikulum. Proses penelitian kepustakaan diawali dengan penelusuran literatur yang sistematis menggunakan kata kunci terkait, seperti "tantangan guru PPKn", "implementasi Kurikulum Merdeka", dan "perubahan kurikulum K13". Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan model analisis interaktif, yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Agustang, 2023). Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi guru, seperti tuntutan kreativitas, adaptasi terhadap teknologi, resistensi siswa, serta kebutuhan pengembangan kompetensi profesional (Sembiring et al., 2023; Agustang, 2023; Purba et al., 2022). Metode kepustakaan juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi solusi yang telah diusulkan atau diterapkan dalam literatur, seperti pelatihan guru, penguatan komunitas belajar, dan pengembangan perangkat ajar (Purba et al., 2022; Agustang, 2023). Dengan demikian, metode ini tidak hanya memetakan tantangan, tetapi juga menawarkan rekomendasi berbasis bukti untuk mendukung guru PPKn dalam proses transisi kurikulum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perubahan kurikulum di Indonesia dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka merupakan upaya pemerintah dalam menyesuaikan sistem pendidikan nasional dengan perkembangan zaman, tuntutan globalisasi, serta kebutuhan peserta didik abad ke-21. Dalam konteks ini, guru PPKn memiliki posisi strategis karena melalui mata pelajaran tersebut nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan tanggung jawab kewarganegaraan ditanamkan kepada siswa. Namun, hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa perubahan kurikulum ini tidak hanya membawa peluang, tetapi juga tantangan besar bagi guru PPKn dalam proses implementasinya di sekolah. tantangan utama yang muncul yaitu:

### **kesiapan guru dalam memahami filosofi dan struktur Kurikulum Merdeka**

Berdasarkan temuan Hasanah dan Pratiwi (2023), banyak guru PPKn belum sepenuhnya memahami konsep dasar Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis kompetensi dan profil pelajar Pancasila. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan yang diterima oleh guru. Padahal, pemahaman yang komprehensif terhadap kurikulum baru merupakan prasyarat utama agar guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Akibatnya, banyak guru yang masih menggunakan pola pembelajaran lama sebagaimana pada Kurikulum 2013, yang berfokus pada penyampaian materi, bukan pengembangan kompetensi siswa. Selain keterbatasan dalam pemahaman konsep, sebagian guru juga mengalami kesulitan dalam menerjemahkan filosofi Kurikulum Merdeka ke dalam praktik pembelajaran yang konkret. Kurikulum ini mengedepankan fleksibilitas dan otonomi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal dan karakteristik siswa. Namun, bagi banyak guru yang terbiasa dengan pendekatan administratif dan instruksi yang terstruktur pada Kurikulum 2013, perubahan paradigma ini menjadi tantangan besar.

Menurut Hidayat, Firdaus, dan Sari (2022), banyak guru merasa ragu untuk berinovasi karena belum memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan belajar mengajar. Akibatnya, pembelajaran PPKn sering kali masih berorientasi pada penyelesaian materi, bukan pada pembentukan karakter dan kemampuan berpikir kritis siswa sebagaimana yang diharapkan oleh Kurikulum Merdeka. Pemahaman terhadap filosofi dasar Kurikulum Merdeka juga menuntut guru untuk memiliki literasi kurikulum yang tinggi dan kemampuan reflektif dalam merancang pembelajaran. Menurut Fullan (2010), perubahan kurikulum yang berhasil sangat bergantung pada kapasitas guru dalam memahami makna perubahan dan mengimplementasikannya secara konsisten. Guru tidak hanya dituntut memahami dokumen kurikulum secara teoritis, tetapi juga harus mampu mengaitkannya dengan konteks sosial, budaya, dan moral siswa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berbasis praktik, lokakarya, dan komunitas belajar menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan filosofi Kurikulum Merdeka dapat terwujud dalam pembelajaran yang bermakna dan berorientasi pada kemerdekaan belajar.

### **Pergeseran paradigma pembelajaran**

Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk menjadi fasilitator dan pembimbing, bukan sekadar menyampaikan pengetahuan. Guru dituntut mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Menurut Munirah (2022), peran guru dalam Kurikulum Merdeka harus berubah menjadi pendamping yang memotivasi dan memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan berinovasi. Namun, dalam kenyataannya, sebagian guru PPKn masih menerapkan model pembelajaran konvensional yang berorientasi pada hafalan konsep, bukan pada pencapaian kompetensi dasar yang sudah ditentukan secara rinci. Sebaliknya, Kurikulum Merdeka memberi ruang kebebasan bagi guru untuk menyesuaikan kegiatan belajar dengan kebutuhan, minat, dan potensi siswa. Menurut Putra dan Sari (2022), kebebasan ini sejalan dengan konsep student-centered learning, yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan, bukan mendominasi pembelajaran. Namun, pergeseran peran ini tidak mudah dilakukan karena sebagian guru masih terbiasa dengan sistem lama yang menekankan penyelesaian materi dan pencapaian target administratif.

Paradigma baru ini juga menekankan pentingnya pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) sebagai sarana penguatan Profil Pelajar Pancasila. Melalui pendekatan ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif dalam memecahkan masalah kehidupan nyata. Hidayat, Firdaus, dan Sari (2022) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek tidak hanya mengajarkan konsep kognitif, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian sosial. Sayangnya, banyak guru PPKn yang masih mengalami kesulitan dalam merancang proyek pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman guru dalam menghubungkan tema kewarganegaraan dengan isu sosial di lingkungan sekitar siswa. Perubahan paradigma pembelajaran juga berkaitan erat dengan perubahan cara pandang terhadap evaluasi hasil belajar. Dalam Kurikulum Merdeka, asesmen bukan lagi sekadar alat untuk mengukur pengetahuan, melainkan bagian dari proses belajar itu sendiri. Lestari (2022) menjelaskan bahwa guru perlu melakukan asesmen formatif yang berkelanjutan agar dapat memantau perkembangan siswa secara utuh—baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Hal ini menuntut guru untuk memiliki kemampuan reflektif dan analitis yang tinggi dalam menilai kemajuan belajar peserta didik. Tanpa kesiapan tersebut, guru berisiko

kembali pada model penilaian lama yang hanya menilai hasil akhir, bukan proses belajar siswa secara menyeluruh. Pergeseran paradigma pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk tidak hanya memahami perubahan konsep, tetapi juga mengubah pola pikir dan budaya mengajar. Guru PPKn, sebagai pendidik nilai dan moral kebangsaan, perlu memanfaatkan fleksibilitas kurikulum ini untuk menumbuhkan karakter Pancasila, berpikir kritis, dan sikap demokratis di kalangan siswa. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan, komunitas belajar guru, serta dukungan kelembagaan menjadi faktor penting agar pergeseran paradigma ini benar-benar terwujud dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

### **Keterbatasan sarana dan prasarana**

Hambatan dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Wahyudi (2023) menjelaskan bahwa kesenjangan fasilitas antara sekolah perkotaan dan pedesaan menyebabkan pelaksanaan kurikulum baru berjalan tidak merata. Guru di daerah terpencil sering kali menghadapi keterbatasan akses teknologi dan sumber belajar digital, padahal Kurikulum Merdeka sangat menekankan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kondisi ini menghambat guru dalam mengembangkan perangkat ajar dan media pembelajaran yang inovatif, sehingga tujuan pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual sulit tercapai secara optimal. Keterbatasan infrastruktur teknologi, banyak sekolah di daerah masih menghadapi masalah klasik seperti kekurangan ruang kelas, keterbatasan sarana laboratorium, serta kurangnya akses terhadap jaringan internet yang stabil. Menurut Lestari (2022), kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap motivasi dan efektivitas kerja guru. Tanpa dukungan sarana pembelajaran yang memadai, guru kesulitan mengimplementasikan pendekatan-pendekatan baru seperti pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi yang menjadi ciri khas Kurikulum Merdeka. Akibatnya, pembelajaran PPKn di beberapa sekolah masih berlangsung secara konvensional dan berpusat pada guru, bukan pada keaktifan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan fasilitas pendidikan menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kurikulum di seluruh Indonesia.

Keterbatasan sarana juga berkaitan dengan minimnya dukungan anggaran pendidikan dan koordinasi antar lembaga. Menurut Hasanah dan Pratiwi (2023), tidak semua sekolah memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk menyesuaikan infrastruktur dengan kebutuhan Kurikulum Merdeka. Sekolah di daerah dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) terbatas sering kali harus memprioritaskan kebutuhan dasar seperti alat tulis, buku, dan perawatan gedung, sehingga investasi dalam sarana digital dan pelatihan guru menjadi terabaikan. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang belum seragam dalam mendukung implementasi kurikulum turut memperlebar kesenjangan antar sekolah. Oleh karena itu, pelaksanaan Kurikulum Merdeka memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan agar setiap sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan semangat merdeka belajar.

### **Evaluasi dan penilaian pembelajaran**

Perubahan sistem asesmen juga memunculkan tantangan tersendiri. Kurikulum 2013 berfokus pada kompetensi inti dan dasar, sedangkan Kurikulum Merdeka menggunakan capaian pembelajaran yang lebih luas dan fleksibel. Menurut Lestari (2022), banyak guru masih mengalami kebingungan dalam merancang asesmen formatif dan sumatif yang sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka. Penilaian yang seharusnya bersifat holistik sering kali masih dilakukan secara kognitif, tanpa memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa. Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan dan penguatan kapasitas guru dalam menyusun instrumen penilaian yang autentik dan bermakna. Perubahan paradigma asesmen juga

menuntut guru untuk memiliki kemampuan analisis yang lebih tinggi dalam mengamati perkembangan belajar siswa. Dalam Kurikulum Merdeka, asesmen tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur hasil belajar, tetapi juga sebagai sarana untuk memberi umpan balik (feedback) dan memperbaiki proses pembelajaran. Hidayat, Firdaus, dan Sari (2022) menjelaskan bahwa guru perlu melibatkan berbagai teknik asesmen seperti portofolio, proyek, observasi, dan penilaian diri (self-assessment) agar hasil evaluasi benar-benar menggambarkan kompetensi nyata siswa. Namun, keterbatasan waktu, beban administrasi, dan kurangnya pelatihan asesmen sering membuat guru kembali menggunakan metode penilaian tradisional yang bersifat tes tertulis semata.

Penilaian dalam Kurikulum Merdeka juga mengandung nilai humanistik dan reflektif, yang menekankan penghargaan terhadap proses belajar siswa, bukan hanya hasil akhir. Menurut Putra dan Sari (2022), asesmen yang baik harus memotivasi siswa untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan penilaian autentik yang menilai kemampuan siswa dalam konteks nyata, seperti keterlibatan dalam diskusi, kemampuan memecahkan masalah sosial, atau sikap tanggung jawab dalam proyek kelompok. Untuk mencapai hal ini, diperlukan peningkatan literasi asesmen bagi guru agar mampu memahami perbedaan antara asesmen sebagai pengukuran hasil belajar dan asesmen sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi dalam Kurikulum Merdeka diharapkan tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga mampu menggambarkan perkembangan karakter dan potensi siswa secara utuh.

### **Dukungan kebijakan dan kelembagaan**

Dukungan kebijakan dan kelembagaan juga berperan penting dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Rahmawati (2021) menegaskan bahwa guru membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dinas pendidikan, serta pemerintah daerah agar pelaksanaan kurikulum berjalan optimal. Dukungan ini dapat berupa penyediaan pelatihan berkelanjutan, pembentukan komunitas belajar guru, dan penguatan infrastruktur sekolah. Tanpa sinergi yang baik antara guru dan lembaga pendidikan, Kurikulum Merdeka berisiko hanya menjadi kebijakan administratif tanpa implementasi nyata di lapangan. Dari hasil kajian pustaka juga ditemukan bahwa adaptasi guru terhadap pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) masih belum optimal. Kurikulum Merdeka mengarahkan guru untuk mengembangkan proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa sebagai sarana menguatkan profil pelajar Pancasila. Namun, Putra dan Sari (2022) menemukan bahwa banyak guru masih kesulitan merancang proyek yang kontekstual dan sesuai dengan capaian pembelajaran. Sebagian guru belum terbiasa mengaitkan tema-tema kewarganegaraan dengan permasalahan sosial di lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran PPKn masih cenderung bersifat teoritis. Selain itu, penguasaan teknologi digital juga menjadi aspek krusial dalam pembelajaran modern yang diusung oleh Kurikulum Merdeka.

Hidayat, Firdaus, dan Sari (2022) menyebutkan bahwa guru harus mampu memanfaatkan berbagai platform pembelajaran digital untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Namun, kemampuan ini belum merata di kalangan guru PPKn. Sebagian guru masih menghadapi kendala dalam menggunakan teknologi untuk menyusun modul ajar, melaksanakan asesmen daring, maupun berinovasi dalam media pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital di kalangan pendidik agar tujuan Kurikulum Merdeka yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dapat tercapai. Implementasi Kurikulum Merdeka memberikan peluang besar bagi peningkatan kualitas pembelajaran PPKn, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan guru dan dukungan sistem pendidikan secara menyeluruh. Guru perlu memperkuat pemahaman kurikulum, meningkatkan

kemampuan pedagogis dan digital, serta memperluas kolaborasi profesional untuk berbagi praktik baik. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga pendidikan harus terus memberikan pelatihan berkelanjutan, dukungan sarana, serta pendampingan agar proses transisi kurikulum dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan sinergi tersebut, pembelajaran PPKn diharapkan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk warga negara yang berkarakter Pancasila, kritis, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

## **KESIMPULAN**

Perubahan kurikulum dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka membawa dampak signifikan terhadap praktik pembelajaran, khususnya bagi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan identitas bangsa. Hasil kajian menunjukkan bahwa guru PPKn menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pemahaman konsep kurikulum, kesiapan pedagogis, maupun keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami filosofi Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas, pembelajaran berbasis proyek, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pelatihan berkelanjutan, resistensi terhadap perubahan, serta keterbatasan literasi digital. Di sisi lain, perubahan paradigma pembelajaran dari teacher-centered menjadi student-centered menuntut guru untuk berperan sebagai fasilitator yang kreatif, reflektif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Tantangan dalam evaluasi juga muncul karena sistem asesmen pada Kurikulum Merdeka menekankan pendekatan formatif dan autentik yang berorientasi pada proses, bukan sekadar hasil akhir. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesiapan guru, dukungan kelembagaan, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan pendidikan. Guru PPKn diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang adaptif terhadap dinamika kurikulum dan terus mengembangkan kompetensi profesionalnya agar mampu mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter pelajar Pancasila yang kritis, demokratis, dan bertanggung jawab.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Daryono. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Kurikulum. *Jurnal Pendidikan*, 15(2), 45–56.
- Dewantara, K. H. (1977). Bagian pertama pendidikan. *Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa*, 1, 215.
- Fullan, M. (2010). *All systems go: The change imperative for whole system reform*. Corwin Press.
- Hasanah, L., & Pratiwi, A. (2023). Kesiapan guru PPKn dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(3), 101–113.
- Hidayat, A., Firdaus, M., & Sari, D. (2022). Tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 9(1), 12–25.
- Hidayat, R., Firdaus, A., & Sari, D. P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka: Fleksibilitas pembelajaran dan tantangan kompetensi guru di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(3), 210–225.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek). (2021). *Kurikulum Merdeka: Konsep dan implementasi dasar*. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- Lestari, N. (2022). Perubahan sistem penilaian dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 10(2), 88–97.
- Mulia, H. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran PPKn: Studi Literatur. *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Matematika*, 3(1).

- Munirah. (2022). Transformasi peran guru dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(1), 77–85.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (1993). *Curriculum: Foundations, principles and issues*. Boston: Allyn and Bacon.
- Purba, S., Naibaho, L., & Rantung, D. (2022). Pemberdayaan KKG PAK dalam Peningkatan Kompetensi Profesional Guru PAK dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka
- Putra, A., & Sari, M. (2022). Paradigma baru pembelajaran di era Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(1), 55–67.
- Rahmawati, I. (2021). Peran guru dalam inovasi pembelajaran PPKn pada Kurikulum 2013. *Cakrawala Pendidikan*, 40(2), 299–310.
- Sembiring, T., Prasiska, G., Ramadhani, K., Widia, P., Yessika, N., Siahaan, S., Andini, L., Siagian, F., & , R. (2023). Tantangan Guru Dalam Menerapkan Model Pembelajaran PPKN Pada Kurikulum Merdeka
- Sulfemi, W. (2019). Problematika implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(2), 150–160.